



Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

LAKIP 2025

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAMUJU**

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya pelaksanaan proses demokrasi sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2025 dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dalam Periode Tahun 2021-2026.

Semoga ditahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 03 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas



MUHAMMAD JUFRI BADAU, SKM, M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19760123 200501 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai kewajiban ikut serta dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Mamuju yakni Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman serta mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yaitu Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan tujuan OPD Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan. Pada Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Melaksanakan 1 Program Rutin/Penunjang yang terdiri dari 7 Kegiatan dengan 23 Sub Kegiatan dan 3 Program Teknis yang terdiri dari 6 Kegiatan dengan 11 Sub Kegiatan. Alokasi anggaran pokok pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju tahun 2025 sebesar Rp. 3.365.317.658,- meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 2.520.067.658,- dan belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 899.500.000,- dan setelah perubahan jumlah anggaran Dinas Ketahanan pangan sebesar Rp. 3.051.348.783,- dengan belanja pegawai sebesar Rp. 2.494.037.320,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 557.311.463,-. Adapun realisasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan ditahun 2025 sebesar Rp. 2.868.157.097,- atau sekitar 96 %.

Dari hasil pengukuran secara umum, maka kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari kegiatan/indikator kinerja mencapai **100 %** dan berada di interval 91,5% - 100%, Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju masih mengalami hambatan antara

lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam penyusunan anggaran yang akan datang. Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah kedepan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu – Isu Strategis	2
1.3 Maksud & Tujuan	3
1.4 Uraian Singkat Organisasi	5
1.4.1 Tugas Pokok & Fungsi	5
1.4.2 Struktur Organisasi	13
1.4.3 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.2 Indikator Kinerja	23
2.3 Perjanjian Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1 Pengukuran Kinerja	42
3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025	43
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2025	46
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD / Renstra	59
3.1.4 Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional / Provinsi	60
3.2 Upaya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Untuk Meningkatkan Kinerja Dimasa Mendatang	61
3.3 Akuntabilitas Keuangan	63
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	69
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Rekomendasi	73

DAFTAR TABEL

Tabel	1.4.3.a	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	14
Tabel	1.4.3.b	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel	1.4.3.c	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel	1.4.3.d	Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju	16
Tabel	2.1	Matriks Keterkaitan Antara Tujuan & Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025	20
Tabel	2.2	Tujuan, Sasaran & Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan 2025	21
Tabel	2.3	Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan & Sasaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju Tahun 2025	22
Tabel	2.4	Indikator Kinerja Utama	24
Tabel	2.5	Indikator Kinerja Kunci	25
Tabel	2.6	Perjanjian Kinerja Pokok / Murni	32
Tabel	2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan	33
Tabel	2.8	Rencana Anggaran Program Perjanjian Kinerja Perubahan	33
Tabel	2.9	Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ...	34
Tabel	3.1	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju Tahun 2025	43
Tabel	3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025	46
Tabel	3.2.a	Program & Kegiatan Untuk Pencapaian Sasaran 1	49
Tabel	3.2.b	Program & Kegiatan Untuk Pencapaian Sasaran 2	51
Tabel	3.2.c	Program & Kegiatan Untuk Pencapaian Sasaran 3	53
Tabel	3.2.d	Program & Kegiatan Untuk Pencapaian Sasaran 4	56
Tabel	3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD / Renstra	59
Tabel	3.4	Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional / Provinsi	60
Tabel	3.5	Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025	63
Tabel	3.6	Anggaran dan Realisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025	65
Tabel	3.7	Evaluasi Terhadap Target Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Mamuju Tahun 2025	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat sesuai amanat UU No. 18 tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan dasar untuk terselenggaranya "*Good Governance*". Adapun dasar-dasar terselenggaranya "*Good Governance*" yaitu Tap MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan bersih dan bebas KKN, Undang -Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Negara yang bersih dan bebas KKN serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

1.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh pada kinerja Dinas Ketahanan

Pangan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
2. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan dilaksanakannya;
3. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
4. Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas;
5. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
6. Masih terdapat daerah rawan pangan;

7. Belum tersedianya sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat;
8. Rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan sebagai akibat belum optimalnya distribusi, akses dan cadangan pangan;
9. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat;
10. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal;
11. Budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang kurang mendukung konsumsi pangan B2SA;
12. Masih terdapat pangan segar asal tumbuhan di masyarakat yang terindikasi tidak aman dikonsumsi;
13. Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
14. Belum terpenuhinya keadilan dan kesetaraan Gender;
15. Masih rendahnya akses penduduk terhadap layanan Kesehatan;
16. Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia

1.3. Maksud dan Tujuan Laporan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini adalah:

1.3.1. Maksud Laporan :

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju;
- b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Mamuju;
- c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

1.3.2. Tujuan Laporan :

- b. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati;
- c. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
- d. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

1.4. Uraian Singkat Organisasi

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar Hukum Pembentukan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dibidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mamuju melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta kelembagaan pangan;
- Pelaksanaan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan

keamanan pangan, serta kelembagaan pangan;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta kelembagaan pangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan di ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta kelembagaan pangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pangan. Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas Kepala Dinas Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang bertanggung jawab kepada kepala dinas, sekretaris dinas mempunyai tugas pokok : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan

melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penyusunan operasionalisasi rencana kerja administrasi kepegawaian dan keuangan, umum dan perlengkapan, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian dan keuangan, umum dan perlengkapan, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Pembinaan, pengkoordinasian pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris dinas dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi.
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Dalam menjalankan tugas memiliki fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaa ninfrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dibantu oleh Analis Ketahanan Pangan.

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan. Dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi

pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dibantu oleh Analis Ketahanan Pangan.

e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

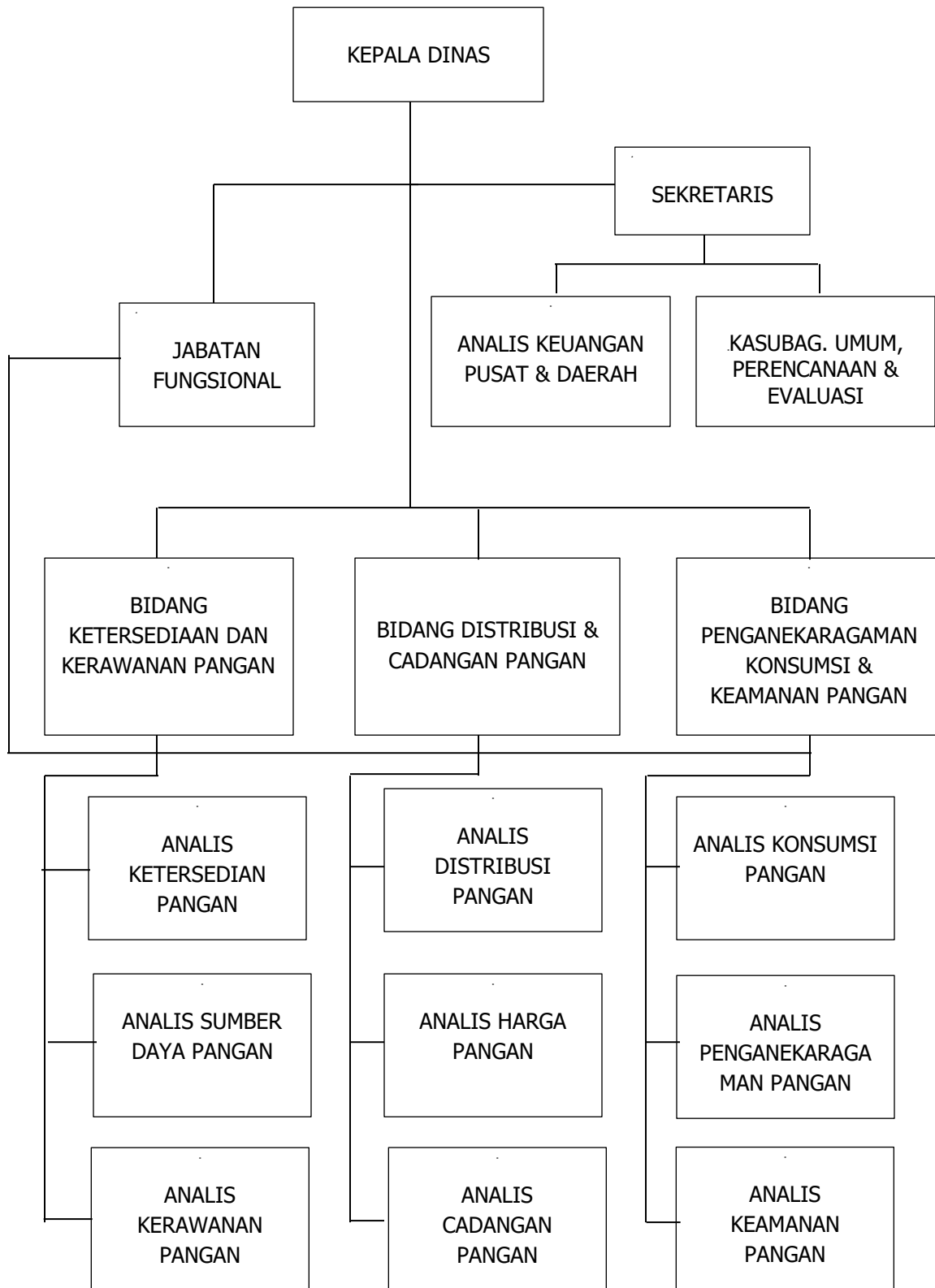
- Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tersebut dibantu oleh Analis Ketahanan Pangan.

1.4.2. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGSNISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU**



1.4.3. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju

1) Sumber Daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju memiliki pegawai ASN sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang PNS dan 6 (enam) orang PPPK, selain pegawai / personil ASN juga dibantu oleh Tenaga administrasi sebanyak 6 (enam) orang.

Berikut jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju berdasarkan jabatan :

Tabel 1.4.3.a
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Struktural Eselon II	1	Orang
2.	Struktural Eselon III	4	Orang
3.	Struktural Eselon IV	1	Orang
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	Orang
5.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	12	Orang
6.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	3	Orang
7.	Pelaksana – Pengadministrasi Perkantoran	2	Orang
8.	Terampil (PPPK)	1	Orang
9.	Pemula (PPPK)	5	Orang
	Jumlah	30	Orang

Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2025, jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju adalah sebanyak 14 (empat belas) orang (46,7 %), dan jumlah pegawai wanita sebanyak 16 (tujuh belas) orang (53,3%).

Tabel 1.4.3.b.
Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki - Laki	14 Orang	46,7 %
2.	Perempuan	16 Orang	53,3 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan Oleh pegawai lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju didominasi oleh Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) seperti pada table berikut:

Tabel 1.4.3.c
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pasca Sarjana (S2)	5 Orang	16,7 %
2.	Sarjana (S1)	18 Orang	60 %
3.	Diploma (D3)	1 Orang	3,3 %
4.	SLTA	6 Orang	20 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sampai saat ini cukup memadai tetapi belum optimal. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.3.d
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Satuan
		Layak	Tidak Layak		
1	Tanah	1		1	Bidang
2	Bangunan Gedung Kantor	1		1	Unit
3	Kendaraan Roda 4	2		2	Unit
4	Kendaraan roda 2	19	4	23	Unit
5	Meja komputer	2		2	Unit
6	Meja biro	9	1	10	Unit
7	Meja kerja kayu	2	2	4	Unit
8	Meja rapat	6	4	10	Unit
9	Sofa	2		2	Set
10	Sound system		1	1	Unit
11	Laptop	9	11	20	Unit
12	Lemari kaca	2		2	Unit
13	Kursi tamu	2	1	3	Unit
14	Kursi kerja	2		2	Unit
15	Lemari es	2		2	Unit
16	PC Unit		3	3	Unit
17	Monitor		1	1	Unit
18	AC	5	3	8	Unit
19	Kamera film	1		1	Unit
20	Lemari besi	1		1	Unit
21	Layar film / proyektor	1	1	2	Unit
22	Meja kerja pejabat eselon II	1		1	Unit
23	Kursi kerja pejabat eselon II	1		1	Unit
24	Freeze	1		1	Unit
25	Timbangan elektronik	2		2	Unit
26	Note book	2		2	Unit

27	Printer	5		5	Unit
28	LCD projektor	1		1	Unit
29	Mesin jahit karung	1		1	Unit
30	Gerobak dorong	1		1	Unit

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (BR) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Mamuju sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Mamuju, yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan

otonomi daerah dalam bidang pangan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas bantuan yang diberikan pemerintah memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 yaitu: **Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman (KEREN).**

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi Kabupaten, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten. Untuk menjadikan Dinas Ketahanan Pangan yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang pangan. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung misi 3 RPJMD yaitu **"Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial"**

Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Untuk keberhasilan perlu ditetapkan tujuan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju yaitu Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan.

Sasaran yang ditetapkan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan;
2. Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Pada tabel berikut dapat dilihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran, dimana tujuan ini memiliki indikator (setelah perubahan) sebagai alat ukur atas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2025.

Tabel 2.1 Matriks Keterkaitan antara tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan (%)	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)
				Persentase Desa Tahan pangan
		Skor PPH Konsumsi (%)	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Tingkat Harga gabah Kering Panen(GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas	Persentase Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen
			Tingkat Konsumsi Energi	

			konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Protein
				Persentase Keamanan Pangan

Sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat target kinerja yang telah ditetapkan selama lima tahun seperti pada table 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan (%)	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	%	23 % (40 Ton)
			Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	Desa	88
			Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di 21asyara produsen dan konsumen	Tingkat Harga gabah Kering Panen(GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	≥HPP
				Persentase Koefisien variasi harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	CV≤10%	CV≤10%
		Skor PPH Konsumsi (%)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan Masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi dan protein	%	87
				persentase Keamanan Pangan	%	100

Untuk Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dalam mencapai Sasaran tersebut diatas melaksanakan 3 program

teknis, 6 kegiatan serta 11 sub kegiatan dan 1 Program Rutin, 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.3 Program / Kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasararan Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Progam	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan (%)	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan Meningkatnya	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
							Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
							Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
				Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
						Penyusunan Peta Kerentangan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota
Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/ Kota dalam	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			

			Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen		rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
	Skor PPH Konsumsi (%)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi	Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan & Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
			Tingkat Konsumsi Protein			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Tingkat Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2.2. INDIKATOR KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	Persen	23 % (40 Ton)	$0,62 \times \text{Jumlah Penduduk Kabupaten (Jiwa)}$	PP 18/2016	ESELON II
		Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	Desa	88	Jumlah desa/Kel. yang aman dan rentan rawan pangan	UU Pangan 18/2012 PP 17/2015	ESELON II
2.	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	$\geq \text{HPP}$	$\geq \text{HPP}$	Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat produsen (petani) $\geq \text{HPP}$ Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	PP 17/2015	ESELON II
		Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	Coefisien Variabel harga pangan pokok (beras) $\leq 10\%$	PP 17/2015	ESELON II
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi dan Protein	Persen	87	$\frac{\text{Tingkat konsumsi}}{\text{EKE (2100 kkal/kap/thn)}} \times 100 \%$	PP 17/2015	ESELON II
		Tingkat Keamanan Pangan (%)	Persen	100	$\frac{\text{Jumlah Bahan Pangan yang aman}}{\text{Total Jumlah bahan pangan yang diuji}} \times 100 \%$	PP 17/2015	ESELON II
4.	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Akip	Predikat	B	LHE SAKIP	Inspektorat	ESELON II

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	KET
1	Meningkatnya penyediaan pangan yang beraneka ragam berbasis sumber daya lokal	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	Persen	100	ESELON III
2	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penanganan wilayah rawan pangan	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persen	100	ESELON III
3	Meningkatnya keterjangkauan dan stabilitas harga pangan pokok	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Persen	10	ESELON III
4	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	Persen	100	ESELON III
5	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar AsalTumbuhan	Persentase PAST yang memenuhi syarat keamanan & mutu pangan	Persen	100	ES. IV / FUNGSIONAL
6	Tersedianya Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Jumlah Jenis infrastruktur	Jenis	0	ES. IV / FUNGSIONAL
7	Tersedianya Data Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
8	Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Persentase Cadangan Pangan	Persen	23	ES. IV / FUNGSIONAL
9	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUA	TARGET	KET
10	Tersedianya data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
11	Terlaksananya pemantauan harga dan pasokan pangan strategis	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisa harga dan Pasokan pangan	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
12	Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	Jumlah LDPM, LUPM dan LPM yang dikembangkan	Kelompok	6	ES. IV / FUNGSIONAL
13	Tersedianya data analisis pola konsumsi pangan	Jumlah dokumen analisis konsumsi pangan	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
14	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pengawasan Keamananan Pangan Segar	Persen	100	ES. IV / FUNGSIONAL
15	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	0	ES. IV / FUNGSIONAL
16	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
17	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
18	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	40	ES. IV / FUNGSIONAL
29	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	40	ES. IV / FUNGSIONAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUA	TARGET	KET
30	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
31	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	ES. IV / FUNGSIONAL
32	Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
33	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	6	ES. IV / FUNGSIONAL
34	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
35	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	ES. IV / FUNGSIONAL
36	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	ES. IV / FUNGSIONAL
37	Tercapainya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUA	TARGET	KET
38	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	ESELON IV
39	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	ESELON IV
40	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	ESELON IV
41	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	ESELON IV
42	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	ESELON IV
43	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	ESELON IV

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUA	TARGET	KET
44	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	ES. IV / FUNGSIONAL
45	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln	24	ES. IV / FUNGSIONAL
46	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	ES. IV / FUNGSIONAL
47	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	ES. IV / FUNGSIONAL
48	Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	ESELON IV
49	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	ESELON IV
50	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	ESELON IV
51	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	ESELON IV
52	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	ESELON IV
53	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	ESELON IV

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUA	TARGET	KET
54	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	ESELON IV
55	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	ESELON IV
56	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	ESELON IV
57	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	ESELON IV
58	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	ESELON IV
59	Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	ESELON IV
60	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	ESELON IV
61	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	ESELON IV
62	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ESELON IV
63	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ESELON IV
64	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	100	ESELON IV

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUA	TARGET	KET
65	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	ESELON IV
66	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	ESELON IV
67	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	ESELON IV
68	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	ESELON IV

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi dilingkungan pemerintahan. Perjanjian kinerja merupakan proses yang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan. Perjanjian kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas, sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2025 meliputi 3 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 7 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Tabel Perjanjian Kinerja Pokok / Murni

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	23% (40 Ton)	134,350,000
		Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	88 Desa	49,334,600
2	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	15,650,200
		Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	≤10%	94,033,500

3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat konsumsi energi dan protein	87	101,939,400
		Persentase Keamanan Pangan	100	22,068,800
4	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Niali AKIP	B (70)	2,951,973,677
J U M L A H				3,369,350,177

Di Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan memperoleh alokasi anggaran pokok / murni sebesar Rp. 3.369.350.177 yang akan digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya target indikator sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pokok / Murni (table 2.6).

Tabel 2.7 Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	23% (40 Ton)	129,644,022
		Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	88 Desa	36,710,600
2	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	7,998,400
		Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	≤10%	39,971,000
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat konsumsi energi dan protein	87	29.029.532
		Persentase Keamanan Pangan	100	7.817.400

4	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Niali AKIP	B (70)	2,837,024,761
J U M L A H				3,051,348,783

Dengan adanya efisiensi anggaran maka Dinas Ketahanan Pangan mengalami pengurangan anggaran dari anggaran Pokok sebesar Rp. 3.369.350.177 menjadi Rp. 3.051.348.783 yang digunakan untuk membiayai seluruh program kegiatan yang mendukung tercapinya target indikator sasaran dan di Tahun 2025 dari 7 (tujuh) indikator yang di perjanjikan semuanya mencapai target 100 %.

2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran pokok sebesar Rp. 3.369.350,177,- yang kemudian mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 3.051.348.783,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.494.037.320,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 557.311.463,-.

Tabel 2.8. *Anggaran Pokok dan Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupateb Mamuju*

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.951.973.677	2.837.024.761	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0	0	

3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	347.623.100	189.296.023	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	47.684.600	17.210.600	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	22.068.800	7.817.400	APBD
J U M L A H		3.369.350.177	3.051.348.783	

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan anggaran yang ditetapkan diharapkan dapat terlaksana secara maksimal, pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel Evaluasi Rencana Kerja (Renja) berikut :

Tabel 2.9. *Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupateb Mamuju*

No	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat capaian realisasi kinerja dan Anggaran (Renja)		Realisasi Renja dan Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		TW I		TW II		TW III		TW IV			12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7*100 %		14 = 6 + 12/3			15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	Tercapainya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	14.261.032.566	100 %	6.872.168.914	100 %	2.838.324.760	28%	780.346.761	22%	652.389.492	21 %	565.439.078	29 %	662.195.630	100 %	2.660.372,961	100 %	94	60 %	9.532.541,875	100	66,8			
1	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketertersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	64.760.070	100 %	56.274.200	100 %	14.526.000	4%	901.000	36%	5.152.000	40 %	5.570.000	20 %	2.903.000.0	100 %	14.526.000	100 %	0	80 %	70.800.200	80	109,3			
1	Tersedianya dokumen RKA OPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dok	20.136.995	4	25.971.043	1	2.903.000							1	2.903.000	1	2.903.000	100 %	0	5	28,874.043	83,3	143,4	Diketapang		
2	Tersedianya dokumen RKA Perubahan OPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	4.888.386	3	11.126.700	1	2.900.000				1	2.900.000		1	2.900.000	100 %	0	100 %	0	4	14,026.700	80,0	266,9	Diketapang		
3	Tersedianya dokumen DPA OPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	6 dok	11.469.309	4	14.470.360	1	2.420.000			1	2.420.000			1	2.420.000	100 %	0	100 %	0	5	16,890.360	83,3	147,3	Diketapang		

1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75	unitt	88,096,066	41	36,163,950	21	44,125,000	1	18,194,000	3,200,000	20	19,476,706	21	40,870,706	100	93	62	77,034,656	83	87.4	Diketa pang		
2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unitt	49,867,119	3	46,529,000	1	7,500,000	1	5,500,000	1,678,000	1	7,178,000	100	96	4	53,707,000	80	107.7	Diketa pang				
3	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33	unitt	15,238,162	21	12,090,000	6	1,680,000	6	1,680,000	6	1,680,000	100	100	27	13,770,000	81.82	90.4	Diketa pang					
4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor & gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unitt	33,797,156	2	20,600,000	0	-	-	-	-	-	-	2	20,600,000	40	61.0	Diketa pang						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	96		71.1	86.6				
Predikat kinerja																		S	S		S	T				
II	Terkelolanya Sumber Daya Ekonomi untuk Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kemandirian Pangan	Persentase Nilai Tukar Petani	100	%	21,025,314	100	3,000,000,000	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	100	3,000,000,000	100	143.0					
1	Tersedianya Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jenis Infrastruktur	8	Jenis	21,025,314	5	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3,000,000,000	63	143						
1	Tersedianya Infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	18	Unitt	21,025,314	15	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3,000,000,000	83	143.0	Diketa pang					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-		83.33	143				
Predikat kinerja																					T	S				
II	1. Meningkatkan penyediaa n pangan yang beraneka ragam berbasis sumber daya lokal 2. Meningkatkan keterjangkauan dan stabilitas harga pangan pokok 3. Meningkatkan pangane ka rasaman konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase Keterse diaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat 2. Persentase peningkatan stabilitas pasoka n dan harga pang a 3. Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	100	%	1,164,500,225	100%	3,932,698,778	100%	188,496,023	-	15%	46,501,400	10%	29,124,600	75%	108,555,136	100%	184,811,136	100	98	95	4,116,879,914	95	353.5	
1	1. Meningkatkan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi 2. Terlaksananya pemantau n harga dan pasokan pangan strategis	Penyediaan Penguatan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasoka n	1. Jumlah LUPM, LUPM dan LPM yang dikembangkan 2. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisa harga dan Pasoka	36	Unitt	157,689,855	24	308,941,450	6	39,971,000	-	3	20,502,000	2	12,569,000	1	4,535,000	6	37,606,000	100	94	30	346,547,450	83.33	219.8	
				6	Dok	237,485,348	4	96,935,020	1	7,998,400	0	1	3,626,400	-	3,190,600	-	626,400	1	7,443,400	100	93	5	104,378,420	83.33	44.0	

1	Tersedianya Data Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	6	D	62,816,426	4	40,249,220	1	6,942,800	1	3,408,800	2,633,600	315,400	1	6,357,800	1	911.6	5	46,607,020	83.3	74.2	Diketa pang		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	91.6		83.3	74.2			
Predikat kinerja																		S	T		T	S			
2	Tersedianya data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Penangan Kerawan Pangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	6	D	110,253,141	1	49,338,960	1	9,767,800	-	63	6,486,400	12	1,080,600	25	2,010,800	10	9,577,800	1	987	58,916,760	1283.33	53.4	
1	Tersedianya data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawan Pangan Kabupaten/ Kota	7	L	110,253,141	48	65,782,600	1	9,767,800	2	6	6,486,400	3	1,080,600	3	2,010,800	12	9,577,800	1	986	75,360,400	83.33	68.4	Diketa pang
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	98		83.3	68.4			
Predikat kinerja																		S	T		T	S			
VII	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%)	85	%	76,149,989	100%	47,803,200	1	7,817,400	0%	70%	5,704,600	25%	1,312,800	5%	650,000	100%	7,667,400	1	989	55,470,600	106	72.8	
1	Terlaksananya Pegawai Keamanan Pangan Segar	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pegawai Keamanan Pangan Segar	100	%	76,149,989	100%	47,803,200	1	7,817,400	0%	70%	5,704,600	25%	1,312,800	5%	650,000	100%	7,667,400	1	989	55,470,600	90	72.8	
1	Terekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	6	D	76,149,989	4	62,719,600	1	7,817,400	1	1	5,704,600	1,312,800	650,000	1	7,667,400	1	985	70,387,000	83.3	92.4	Diketa pang		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	98		83.3	92.4			
Predikat kinerja																		S	T		T	S			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										3,051,348,783	780,348,761	714,490,692	599,690,678	773,726,966	2,868,157,097										
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari seluruh Program (Program TW I s/d IV)																		100	96		100	96			
Predikat Kinerja Seluruh Program (TW. I s/d IV)																		S	T		S	T			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program kegiatan dapat terlaksana secara maksimal dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian anggaran sebesar 96 %. Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu Kerja sama tim dan memaksimalkan tenaga SDM dan Adanya komitmen pimpinan untuk segera melaksanakan kegiatan dan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya adalah :

- 1) Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dipersiapkan lebih awal serta ditingkatkan koordinasi dengan pihak terkait sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (perencanaan);
- 2) Kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 menggunakan sasaran strategis dan indikator sesuai Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut: :

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja > 100 %
2. Berhasil : 80-99,99 %
3. Cukup Berhasil : 60-79,99 %
4. Tidak Berhasil : < 60 %

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur melalui 2 (dua) jenis target, yaitu *maximize target* dan *minimize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika

dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan yang dimaksud dengan *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka kurang baik kinerjanya.

Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan untuk *maximize* dan *minimize* target adalah sebagai berikut :

a. *Maximize target* : Indeks Capaian IKU = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

b. *Minimize target* : Indeks Capaian IKU = $[1 + (1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}})] \times 100 \%$

1. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	%	23 % (40 Ton)	60 % (104,4 Ton)	260 % (Sangat berhasil)
		Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	Desa	88	88	100 % Sangat berhasil
2	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Tingkat Harga gabah Kering Panen(GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	≥HPP	≥HPP	100 % (Sangat berhasil)
		Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	≤10%	≤10%	≤10% (5,68%)	100 % (Sangat Berhasil)

3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi dan protein	%	87	87,11	100,% (Sangat Berhasil)
		Persentase Keamanan Pangan	%	100%	100	100 % (Sangat Berhasil)
4	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Akip	Nilai	69	69	% Sangat (Berhasil)

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju telah melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026. Dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan tertuang 1 (satu) tujuan, 4 (Empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator. Capaian indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1 diatas.

Sasaran Pertama Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan dengan indikator (1) Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras) diperoleh capaian kinerja sebesar 260 % (Sangat berhasil) bahkan melampau target yang ditetapkan yaitu 23 % (40 Ton) realisasi sebesar 60 % (104,4 Ton). Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mamuju akan digunakan untuk mengantisipasi kekurangan pangan pada saat terjadi bencana alam atau gagal panen akibat kemarau panjang. Untuk indikator (2) yaitun Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan diperoleh capaian kinerja 100 % (sangat berhasil) dari

target 100 % dari target desa 88 desa yang dianalisis realisasi 88 desa,.

Sasaran kedua Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen dengan indikator (1) Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) diperoleh capaian kinerja 100% (sangat berhasil) hal disebabkan karena harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen sebesar Rp. 6.500,- sedangkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar 6.500,- jadi harga pembelian ditingkat produsen sama dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah (HPP) dan indikator (2) Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen diperoleh capaian kinerja 100 % dimana target Koefisien Variasi lebih kecil atau sama dengan 10 % realisasi capaian sebesar 5,68 %. CV yang diperoleh ditahun 2025 lebih kecil dari target CV yang ditetapkan yaitu 10 % , penurunan CV ini merupakan dampak dari pelaksanaan stabilitas pasokan dan harga pangan melalui gerakan pangan murah secara periodik dan massif oleh Dinas Ketahanan Pangan pada setiap hari jumat bertempat di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, menjelang hari besar keagamaan dan hari tertentu lainnya sesuai jadwal.

Sasaran ketiga Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan indikator (1) Tingkat Konsumsi Energi dan protein dari target 87 % diperoleh hasil sebesar 87,11 % sehingga capaian kinerja sebesar 100, % atau memenuhintarget yang ditetapkan. (2) Persentase Keamanan Pangan diperoleh capaian kinerja sebesar 100 % dari target

100 %, berdasarkan hasil pengujian rapid test pestisida secara kualitatif sebanyak 20 sampel buah dan sayur yang diuji, hasil pengujian rapid test pestisida secara keseluruhan diperoleh hasil negatif sehingga pangan aman untuk dikonsumsi dan bebas dari cemaran pestisida.

Sasaran keempat Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima diperoleh capaian kinerja 98,2% (Sangat berhasil) Dimana target nilai SAKIP yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 70 (Kategori Baik) realisasi 69 (Kategori Baik) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dari Inspektorat Kabupaten Mamuju.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan
				2024	2025	
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	%	63,7 % (111 Ton))	56,5 % (98,477 Ton)	7,2 %
		Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	Desa	88	88	0%
2	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Tingkat Harga gabah Kering Panen(GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	≥HPP	≥HPP	0%
		Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	≤10%	≤10% (3,73%)	≤10% (5,68%)	1,95%

3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi dan protein	%	88,2	87,11	0,11 %
		Persentase Keamanan Pangan	%	100	100	0%
4	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Akip	Nilai	68,75 (B)	69 (B)	0,25%

Berdasarkan tabel 3.2 dapat digambarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan

A. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025:

- Indikator 1 yaitu Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras), realisasi capaian kinerja ditahun 2024 sebesar 63,7 % (111 Ton) sedangkan untuk tahun 2025 realisasi sebesar 60 % (104,4 Ton) mengalami penurunan sebesar 3,7 %, namun sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Bapanas sebesar 95 Ton yang harus disediakan Dinas Ketahanan Pangan untuk tahun 2025 sesuai perbadan nomor 15 tahun 2023.
- Indikator 2 yaitu Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan, berdasarkan tabel 3.2 di Tahun 2024 diperoleh realisasi capaian sebesar 100 % dari target 100% sama di Tahun 2025 diperoleh realisasi capaian sebesar 100

% dari target 100% % dan Dari hasil analisis komposit FSVA Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 88 desa di Kabupaten Mamuju terdapat satu desa (1%) yang masuk pada kategori desa rentan terhadap kerawanan pangan dengan status Prioritas 3 (agak rentan) yaitu Desa Bela yang berada di Kecamatan Tapalang. Meskipun demikian, apabila merujuk pada hasil analisis individu FSVA, maka terdapat desa rentan pada setiap indikator FSVA kecuali pada indikator desa tanpa akses penghubung memadai, semua desa sudah berada pada status tahan pangan. Berdasarkan indikator individu, terdapat 3 (tiga) penyebab Desa Bela masuk dalam kategori rentan pangan. Penyebab pertama adalah tingginya rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk dengan status Prioritas 1 (sangat rentan). Indikator kedua yaitu tingginya rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga dengan status Prioritas 2 (rentan pangan). Penyebab ke tiga yaitu rendahnya rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga dengan status Prioritas 3 (agak rentan).

B. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran pertama dapat dicapai dengan program dan kegiatan seperti table berikut :

Tabel 3.2.a. Program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran 1

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	Persen	100	100
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	Dokumen	1	1
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1	1
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	23	56,5
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	1
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	23 % (40 Ton)	60 % (104,4 Ton)
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Persen	23 % (40 Ton)	60 % (104,4 Ton)
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persen	100	100
<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</i>	Dokumen	1	1
Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	1	1
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12

C. Analisis Faktor Pencapaian Kinerja

Salah satu upaya pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam pencegahan rawan pangan akibat bencana alam maupun non alam yaitu penyediaan cadangan utama pemerintah dalam bentuk beras.

Berdasarkan Perbadan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Beras Pemerintah, besaran ketersediaan cadangan pangan yang harus disiapkan pemerintah Kabupaten Mamuju ditahun 2025 sebesar 95 ton.

2. **Sasaran 2 : Meningkatkan stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen**

A. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 :

- Indikator 1 Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), berdasarkan tabel 3.2 realisasi capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 100 % sama dengan capaian kinerja di tahun 2025 (mencapai target 100%).
- Indikator 2 koefisien variasi (CV) harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen, berdasarkan table 3.2, di Tahun 2024 realisasi capaian kinerja sebesar 100 % dengan koefisien Variasi 3,73 % sama dengan realisasi capaian di tahun 2025 yaitu 100% dengan koefisien Variasi 5,68 %, ini menunjukkan bahwa Coefisien Variabel (CV) pangan pokok (beras) di Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih berada di bawah standar (stabil) yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 10 %.

B. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran kedua dapat dicapai dengan program dan kegiatan seperti table berikut :

Tabel 3.2.b. Program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran 2

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Persen	100	100
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisa harga dan Pasokan pangan</i>	Dokumen	1	1
Pemantauan Stok Pasokan Dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	1
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Jumlah LDPM, LUPM dan LPM yang dikembangkan</i>	Unit	6	6
Pengembangan Kelembagaan & Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	6	6

C. Analisis Faktor Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen yaitu melalui survei atau pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok di 10 pasar yang ada di kecamatan yaitu Pasar Sentral dan Pasar Regional (Kecamatan Mamuju), Pasar Dayangginna (Kec. Tapalang), Pasar Pasa'bu (Kec. Tapalang Barat), Pasar Bonehau (Kec. Bonehau), Pasar Kalumpang (Kec. Kapumpang), Pasar Tasiu (Kec. Kalukku), Pasar Toansang (Kec. Papalang), Pasar tarailu (Kec. Sampaga

dan Pasar Campaloga (Kec. Tommo) yang dilakukan satu kali dalam seminggu yang kemudian dilaporkan ke provinsi dan pusat. Adapun kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju yang membantu pemerintah Daerah dalam penanganan inflasi yaitu pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan setiap hari kerja di Kantor Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Mamuju dan di beberapa lokasi sehubungan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan hari – hari besar lainnya.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)

A. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 :

- Indikator 1 Tingkat Konsumsi Energi dan protein, berdasarkan tabel 3.2 Tahun 2024 realisasi capaian kinerja sebesar 87 dan untuk Tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 87,11 mengalami peningkatan sebesar sebesar 0,11 %.
- Indikator (2) Persentase keamanan pangan, berdasarkan tabel 3.2 Tahun 2024 dan tahun 2025 realisasi capaian kinerja sama yaitu sebesar 100 % Dimana dari 20 sampel pangan yang diuji sama tidak mengandung bahan berbahaya.

B. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran ketiga dicapai dengan program dan kegiatan seperti table berikut :

Tabel 3.2.c. Program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran 3

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	Persen	100	100
<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Jumlah dokumen analisis konsumsi pangan</i>	Dokumen	1	1
Penyusunan & Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persen	100	100
<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Pengawasan Keamananan Pangan Segar</i>	Persen	100	100
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1

C. Analisis Faktor Pencapaian Kinerja

Tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Mamuju berdasarkan hasil analisis sudah mencapai target karena Pada indikator Tingkat konsumsi energi dan protein telah tercapai 100 % pada Tahun 2025. Berdasarkan Jumlah Konsumsi Energis sebesar 2.100,6 Kkal/Kap/hari dan jika dipersentasekan terhadap nilai standar diperoleh hasil 100 %, sedangkan

untuk jumlah konsumsi protein pada tahun 2025 sebesar 57,9 gram/Kapita/hari dan jika dipersentasekan terhadap nilai standar diperoleh hasil 101 %, hal ini menunjukkan bahwa jumlah konsumsi energi dan protein yang dikonsumsi sudah melebihi standar (100%). Jumlah skor PPH Konsumsi ideal 100. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui pencapaian skor PPH. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Dari Hasil capaian terhadap indikator skor PPH Tahun 2025 diperoleh hasil 87,11 jika dibandingkan dengan target skor PPH Konsumsi Tahun 2025 berdasarkan RPJMN sebesar 86 terlihat telah melampaui target, tetapi masih belum mencapai skor ideal yaitu 100 hal ini menunjukkan bahwa dari segi kualitas konsumsi belum memenuhi standar yang berarti bahwa tingkat keberagaman konsumsi pangan di kabupaten mamuju belum optimal, hal ini disebabkan karena ada beberapa kelompok pangan yang berlebihan dikonsumsi oleh masyarakat yakni beras, minyak dan lemak dan ada juga kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi oleh masyarakat yakni Umbi-umbian, Pangan hewani, sayuran dan buah, sedangkan yang telah seimbang yakni kelompok pangan gula dan buah biji berminyak Tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami penurunan dari 88,62 menjadi 87,11 hal ini disebabkan karena kurangnya kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan skor Pola

Pangan Harapan Konsumsi Pangan di kabupaten mamuju diantaranya beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya tetapi tahun 2025 terjadi efisiensi sehingga beberapa kegiatan tidak dilaksanakan misalnya Desa B2SA, Pemberian bahan pangan bagi anak stunting, Genius, B2SA Go To School yang memberikan sosialisasi pemahaman kepada Masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi Seimbang dan aman (B2SA) karena kondisi di kabupaten mamuju dari segi ketersediaan pangan cukup, tetapi pola pikir masyarakat yang masih sangat kurang tentang bagaimana mengkonsumsi pangan yang memenuhi standar kecukupan gizi.

4. **Sasaran 4 : Terlaksananya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**

A. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 :

Tahun 2024 hasil evaluasi SAKIP diperoleh bobot 69 dengan kategori **Baik** kemudian ditahun 2025 belum ada nilai karena baru akan dilakukan evaluasi dokumen perencanaan di awal tahun 2026.

B. Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Untuk sasaran 4 yaitu Terlaksananya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.d. Program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran 4

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Persen	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat Daerah</i>	Persen	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org	24	24
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100
Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat Daerah	Persen	100	100
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	0
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Laporan	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	12

<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	Persen	100	100
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar pajaknya	Unit	21	21
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	Unit	1	1
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	Unit	6	6
Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor & gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhailitasi	Unit	1	1

C. Analisis Faktor Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam memunjang terlaksananya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima yang diukur dengan indikator nilai SAKIP yaitu dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan tepat waktu.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD / Renstra

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD / Renstra 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan (%)
I.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	%	95,56	97	98,51
		Skor PPH Konsumsi	%	87,11	88	98,99
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	%	56,5 % (98,477 Ton)	28,7 (50 Ton)	196
		Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	Desa	88	88	100
2	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Tingkat Harga gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	≥HPP	≥HPP	100
		Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	≤10%	≤10% (5,68%)	≤10%	100
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi dan protein	%	87,11	88	98,98
		Persentase Keamanan Pangan	%	100	100	100
4	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Akip	Nilai	69 (B)	70,1 (BB)	98

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Mamuju dari 7 (tujuh) indikator capaian kinerja yang ditetapkan 4 (empat) indikator telah mencapai target akhir Renstra yaitu indikator Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan 88 desa, Tingkat Harga gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (\geq HPP), Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen (\leq 10%) dan Persentase Keamanan Pangan 100 %. 1 (satu) indikator yang melebihi target akhir renstra yaitu Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras) sebesar 56,5 % (98,477 Ton) dan 2 (dua) indikator tujuan dan sasaran yang belum mencapai target yaitu baru sampai 98 % dan diharapkan diakhir periode sudah mencapai target.

3.1.4. Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional / Provinsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Nasional / Provinsi	Provinsi	Kabupaten Mamuju	Persentase Capaian (%)
1.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan	Skor PPH	94	87	87,11	92,67

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional (Badan Pangan Nasional) pada tahun 2025 tercatat sebesar 94 poin, sedangkan Kabupaten Mamuju mencapai 87,11 poin dengan persentase capaian 92,67 % yang artinya belum mencapai standar nasional namun mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, target PPH yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi barat sebesar 87 poin dan berhasil dicapai, sedangkan Kabupaten Mamuju melebihi target dengan capaian sebesar 87,11 poin. Peningkatan skor ini terutama didorong oleh perbaikan konsumsi pada

komoditas pangan kelompok padi-padian, sayur, dan buah. Namun, capaian ini masih berada di bawah target nasional yang sebesar 100 poin. Meskipun PPH Kabupaten Mamuju terus meningkat, keberagaman dalam konsumsi pangan belum sepenuhnya tercapai, dan pola konsumsi masyarakat masih perlu diarahkan agar lebih mencerminkan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)

3.2. UPAYA DINAS KETAHANAN PANGAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DIMASA MENDATANG

A. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal tahun 2025.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

- B. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah
- Pengelolaan Keuangan yang transparan dengan didukung dengan SDM yang berkualitas yang mampu mengimplementasikan penatausahaan akrual.
- C. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat Daerah
- a. Meningkatkan Pelayanan Pasca Bencana terhadap masyarakat dengan optimal. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari SKPD di Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.
 - b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Tani dll melalui kegiatan yang terkait.
 - c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Badan Ketahanan pangan Pusat.
- D. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan
- a. Menurunkan Daerah Rentan rawan pangan.
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola konsumsi B2SA sehingga dapat memenuhi gizi keluarga.
 - c. Meningkatkan Anggaran untuk Pengadaan cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
 - d. Melaksanakan Pemantauan Harga Pangan Pokok secara Reguler dan kontinyu sehingga dapat menekan inflasi dan stabilisasi harga pangan pokok terjaga.
 - e. Melaksanakan Pengujian terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang banyak dikonsumsi masyarakat agar bebas dari kandungan bahan –bahan berbahaya.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aspek keuangan yang digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPD maupun Indikator Kinerja Utama. Gambaran Realisasi APBD Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	100	100	184.181.136
		Program Penanganan Kerawanan pangan	Capaian Analisis Peta Kerentanan & Ketahanan Pangan	100	100	15.935.600
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PAST Yang Memenuhi Syarat Keamanan & Mutu Pangan	85	85	7.667.400
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2.660.372.961

Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 4 program dan 13 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat .
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 188.496.023 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 184.181.136 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,71 %, yang diarahkan untuk kegiatan 3 bidang pada Dinas ketahanan Pangan yaitu Bidang Penganekaragaman dan konsumsi Pangan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan dan Bidang Distribusi dan Cadangan pangan. Hasil yang dicapai adalah : Tersusunnya dokumen Neraca Bahan Makanan untuk 1 tahun, terpantaunya 12 komoditi harga pangan dan stabilitas harga pangan pokok di 6 pasar kecamatan, terbinanya Kelompok Wanita Tani / TP. PKK, tersedianya cadangan beras pemerintah (CPP),
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.710.600 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 15.935.600 dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 95,36 %, yang diarahkan untuk kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Hasil yang dicapai adalah : Tersedianya Peta Desa Rentan Rawan Pangan untuk mengetahui wilayah / desa yang masuk rentan rawan pangan untuk intervensi perbaikan sesuai indikator penyebab masuk kategori wilayah rentan rawan pangan.
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.667.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.817.400,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 98,08 %, yang diarahkan untuk kegiatan di Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan

pangan. Hasil yang dicapai : Terselenggaranya pertemuan untuk penguatan kelembagaan keamanan pangan segar, teregistrasinya produk pangan segar, pemantauan dan pengujian bahan pangan segar asal tumbuhan di pasar tradisional dan modern (Alfa mart dan hypermart).

- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.830.324.760 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.660.372.961 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,73 %, yang diarahkan untuk kegiatan rutin kesekretariatan Dinas Ketahanan pangan. Hasil yang dicapai adalah : Terlaksananya perencanaan dan penganggaran serta pelaporan pada Dinas Ketahanan Pangan, Terbayarnya Gaji PNS dan PPPK, Terlaksananya kegiatan rutin yang meliputi urusan rumah tangga kedinasan seperti, terselenggaranya rapat-rapat koordinasi kedinasan, pemeliharaan kendaraan dan kebersihan kantor terjaga.

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK					SISA PAGU (Rp)
					KEUANGAN		FISIK			
					TERBAYAR		TTB	KEMAJUAN	TTB	
					Rp.	%	%	%	%	
1	2	3	4	5 (4/Tot 4*100)	6	7(6/4*100)	8(7*5)/100	9	10(9*5)/100	11 (4-6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		3,051,348,783	100	2,868,157,097	94.00	94.00	94.00	94.00	183,691,686
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,838,324,760	93.02	2,660,372,961	93.73	87.19	93.73	87.19	177,951,799
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14,526,000	0.5	14,526,000	100.00	0.48	100.00	0.48	-

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2,903,000	0.10	2,903,000	100.00	0.10	100.00	0.10	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	2,900,000	0.10	2,900,000	100.00	0.10	100.00	0.10	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	2,420,000	0.08	2,420,000	100.00	0.08	100.00	0.08	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2,070,000	0.07	2,070,000	100.00	0.07	100.00	0.07	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4,233,000	0.14	4,233,000	100.00	0.14	100.00	0.14	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,586,327,320	84.76	2,450,569,976	94.75	80.31	94.75	80.31	135,757,344
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Org / Bln	2,494,037,320	81.74	2,358,339,976	94.56	77.29	94.56	77.29	135,697,344
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	75,420,000	2.47	75,360,000	99.92	2.47	99.92	2.47	60,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Lap	16,870,000	0.55	16,870,000	100.00	0.55	100.00	0.55	-
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4,200,000	0.14	4,200,000	100.00	0.14	100.00	0.14	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4,200,000	0.14	4,200,000	100.00	0.14	100.00	0.14	-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		101,642,040	3.33	79,723,400	78.44	2.61	78.44	2.61	21,918,640
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket	-	0.00	0					-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket	-	0.00						-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Paket	-	0.00						-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 Paket	11,081,040	0.36	11,081,040	100.00	0.36	100.00	0.36	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4,880,000	0.16	4,490,000	92.01	0.15	92.01	0.15	390,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Lap	-	0.00						-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	85,681,000	2.81	64,152,360	74.87	2.10	74.87	2.10	21,528,640
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20,000,000	0.66	20,000,000	100.00	0.66	100.00	0.66	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	20,000,000	0.66	20,000,000	100.00	0.66	100.00	0.66	-
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		58,324,400	1.91	41,624,879	71.37	1.36	71.37	1.36	16,699,521
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	51,124,400	1.68	34,424,879	67.34	1.13	67.34	1.13	16,699,521

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	7,200,000	0.24	7,200,000	100.00	0.24	100.00	0.24	-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		53,305,000	1.75	49,728,706	93.29	1.63	93.29	1.63	3,576,294
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 Unit	44,125,000	1.45	40,870,706	92.62	1.34	92.62	1.34	3,254,294
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	7,500,000	0.25	7,178,000	95.71	0.24	95.71	0.24	322,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	1,680,000	0.06	1,680,000	100.00	0.06	100.00	0.06	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit	-	0.00	0					-
II.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		188,496,023	6.18	184,181,136	97.71	6.04	97.71	6.04	4,314,887
8.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		52,858,800	1.73231	49,489,800	93.63	1.62	93.63	1.62	3,369,000
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	6 Unit	39,971,000	1.31	37,606,000	94.08	1.23	94.08	1.23	2,365,000
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	1 Dok	7,998,400	0.26	7,443,400	93.06	0.24	93.06	0.24	555,000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dok	4,889,400	0.16	4,440,400	90.82	0.15	90.82	0.15	449,000
9.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota		106,607,700	3.49	105,666,936	99.12	3.46	99.12	3.46	940,764
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dok	5,545,200	0.18	5,132,200	92.55	0.17	92.55	0.17	413,000
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7,3 Ton	101,062,500	3.31	100,534,736	99.48	3.29	99.48	3.29	527,764
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Ton	-	0.00	-					-
10	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan		29,029,523	0.95	29,024,400	99.98	0.95	99.98	0.95	5,123

	Gizi									
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dok	10,657,400	0.35	10,657,400	100.00	0.35	100.00	0.35	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Lap	18,372,123	0.60	18,367,000	99.97	0.60	99.97	0.60	5,123
II I.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		16,710,600	0.55	15,935,600	95.36	0.52	95.36	0.52	1,275,000
11	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		6,942,800	0.23	6,357,800	91.57	0.21	91.57	0.21	585,000
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dok	6,942,800	0.23	6,357,800	91.57	0.21	91.57	0.21	585,000
12	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota		9,767,800	0.32	9,577,800	98.05	0.31	98.05	0.31	690,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 Lap	10,267,800	0.34	9,577,800	93.28	0.31	93.28	0.31	690,000
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		7,817,400	0.26	7,667,400	98.08	0.25	98.08	0.25	150,000
13	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota		7,817,400	0.26	7,667,400	98.08	0.25	98.08	0.25	150,000
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	7,817,400	0.26	7,667,400	98.08	0.25	98.08	0.25	150,000
	JUMLAH		3,051,348,783	100	2,868,157,097	94.00	94.00	94.00	94.00	183,191,686

Secara keseluruhan program/kegiatan/sub.kegiatan dimana Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp. 3.051.348.784 dan yang dapat direalisasikan yaitu sejumlah Rp.2.868.157.0970 realisasi keuangannya mencapai 94.19 % dan untuk realisasi fisik sebesar 100 %.

3.4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Evaluasi kinerja diperlukan untuk memberikan gambaran tentang penilaian atas keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan dari suatu kegiatan, program atau kebijakan evaluasi kinerja berguna untuk memberi gambaran lebih lanjut mengenai hasil dari pengukuran kinerja atas indikator dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja sangat bermanfaat untuk menentukan perencanaan periode berikutnya, sehingga dapat mencapai sasaran yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap target pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.7. Evaluasi Terhadap Target Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Efisiensi (%)
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	
I.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	96	95,56	99,54	3.014.501.860	2.831.465.297	183.036.563	6,07
		Skor PPH Konsumsi	87	87,11	100,12	36.846.923	36.691.800	115.123	0,31
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	23% (40 Ton)	56,5 % (98,477 Ton)	246	111.497.100	110.107.336	1.389.764	1,24
		Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	88	88	100	16.710.600	15.935.600	775.000	4,63
2	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Tingkat Harga gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	≥HPP	100	7.998.400	7.443.400	555.000	6,93
		Cofisien Variasi harga pangan pokok (beras) di	CV ≤ 10%	≤10% (5,68%)	100	39.971.000	37.606.000	2.365.000	5,91

		tingkat konsumen							
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi dan protein	87	87,11	100,12	29.029.523	29.024.400	5.123	0,01
		Persentase Keamanan Pangan	100	100	100	7.817.400	7.667.400	150.000	1,91
4	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Akip	B (69)	69 (B)	100	2.838.324.760	2.660.372.961	177.951.799	6,26

A. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan

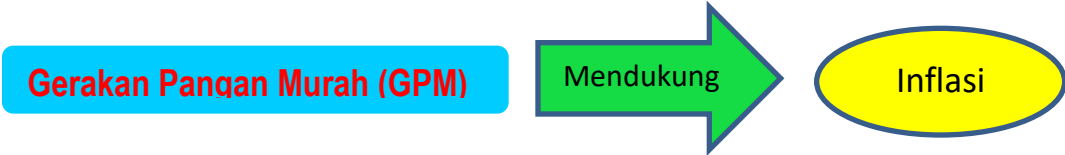
- a. Indikator 1 : Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.497.100, realisasi sebesar Rp. 110.107.336 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.389.764 hal ini disebabkan karena adanya silva pada beberapa belanja barang dan jasa.
- b. Indikator 2 : Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.710.600 realisasi sebesar Rp. 15.935.600 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 775.000 hal ini disebabkan karena adanya silva pada beberapa belanja barang dan jasa.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

- a. Indikator 1 : Tingkat Harga gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.798.400 realisasi sebesar Rp.

- 7.443.400 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 555.000 yang merupakan silva dari beberapa belanja barang dan jasa.
- b. Indikator 2 : Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan alokasi anggaran sebesar 39.971.000 realisasi sebesar Rp. 37.606.000 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 2.365,000 hal ini disebabkan karena adanya siva pada beberapa belanja barang dan jasa dan silva pada belanja perjalanan dinas dalam daerah.
- C. Sasaran 3 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)
- a. Indikator 1 : Tingkat Konsumsi Energi dan protein dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.029.523 dan realisasi sebesar Rp. 29.024.400 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.123 yang merupakan silva dari belanja barang dan jasa.
- b. Indikator 2 : Persentase Keamanan Pangan dengan laokasi anggaran sebesar Rp. 7.817.400 realisasi sebesar Rp. 7.667.400 sehingga terdapat sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas dalam daerah.
- D. Sasaran 4 : Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indicator Nilai AKIP alokasi anggaran sebesar Rp. 2.838.324.760 realisasi sebesar Rp. 2.660.372.961 sehingga terdapat silva sebesar Rp. 177.951.799 hal ini di sebabkan karena ada perhitungan sisa gaji pegawai dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

INOVASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju selama Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja 100 %.
- 2) Alokasi Anggaran Belanja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Sebesar Rp. 3.051.348.783,- (Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Tigaratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.868.157.097,- (Dua Milyar Delapan ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 94,19%.
- 3) Semua indikator sasaran mencapai 100 % yang artinya mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025.

4.2. Rekomendasi

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju di masa mendatang antara lain :

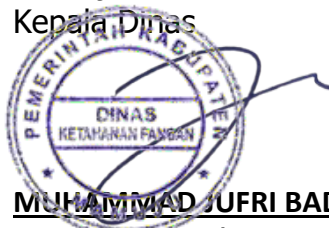
1. Meningkatkan program diversifikasi pangan pokok non beras dan pangan olahan lokal dengan penyediaan stimulan pangan berbasis sumber daya lokal dan alat pengolah pangan lokal untuk meningkatkan konsumsi pangan karbohidrat non beras.

2. Penyediaan stimulan benih dan bibit tanaman untuk mendorong peningkatan konsumsi buah dan sayur melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat serta melakukan sosialisasi dan edukasi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada Masyarakat.
3. Meningkatkan intervensi harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan dan menjual komoditi strategis dengan harga terjangkau.
4. Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu yang cepat akibat terjadinya rawan pangan yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat yang lain.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja dimasa yang akan datang.

Mamuju, 03 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas



MUHAMMAD JUFRI BADAU, SKM, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19760123 200501 1 008